

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan yang lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Salah satu penyerahan wewenang tersebut adalah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Jalan, sebagaimana yang ada pada Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Matrik poin C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana Daerah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan dalam pembangunan jalan kabupaten/kota.

Dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan khususnya di bidang Pekerjaan Umum sub urusan Jalan, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengadakan berbagai usaha untuk melaksanakan otonomi daerah sebaik mungkin, salah satunya adalah perbaikan sarana prasarana transportasi jalan, dimana Kabupaten Mesuji memiliki 121 ruas jalan kabupaten, dengan panjang jalan kabupaten keseluruhan 593,797 km yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.

Dalam perkembangan pembangunan selanjutnya di Kabupaten Mesuji perlu dilakukan pemerataan pembangunan di segala bidang, sehingga sangat diperlukan faktor-faktor pendukung seperti tersedianya jalan yang stabil dan selalu mendapat penanganan, karena bila kondisi jalan tidak ditangani secara tepat tidak akan mencapai umur rencana.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, penanganan jalan saat ini dilakukan terhadap jalan Kabupaten sepanjang 379,2 km. Adapun beberapa program yang dicanangkan yaitu: pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan RPJMD tersebut, sangat diperlukan penentuan skala prioritas penanganan jalan yang tepat dan perhitungan yang matang, agar tujuan dapat tercapai serta tidak mengurangi kualitas pekerjaan.

Dengan memperhatikan pelaksanaan penanganan jalan di Kabupaten Mesuji, banyak terjadi ketimpangan–ketimpangan, seperti: banyaknya jalan yang belum mendapat penanganan baik pemeliharaan maupun peningkatan. Aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan hanya sebagian kecil yang direalisasikan dalam APBD dan penentuan skala prioritas yang telah dilakukan selama ini masih didominasi kebijaksanaan pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yaitu memprioritaskan penanganan proyek jalan yang belum mendapat penanganan dengan mengesampingkan kriteria aspirasi masyarakat.

Pedoman perencanaan jalan selama ini yang digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten adalah berdasarkan Surat Keputusan No.77 Dirjen Bina Marga Tahun 1990, yaitu berdasarkan data Lalu Lintas Harian Rata (LHR) dan Nilai *Net Present Value* (NPV) saja. Hal ini kurang tepat karena hasil prioritas penanganan jalan yang dilaksanakan selama ini menyimpang dari hasil prioritas sebagaimana prioritas penanganan jalan yang didapat dari Surat Keputusan. No.77, Dirjen Bina Marga yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kompleksnya permasalahan di lapangan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: kondisi jalan (yang ditentukan berdasarkan hasil survey Bidang Bina Marga), lalu lintas harian rata-rata (LHR), kebijakan (kewenangan kepala daerah yang dilakukan saat Musrenbang Kabupaten maupun saat pengesahan di provinsi serta Anggaran Biaya Tambahan/ABT), aspirasi masyarakat (pemerataan penanganan jalan di tiap-tiap kecamatan), dan dana anggaran (besaran biaya yang dibutuhkan dalam penanganan jalan).

Memperhatikan uraian di atas, maka perlu dibuat penentuan prioritas perbaikan jalan yang lebih memperhatikan kondisi permasalahan di lapangan dan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, peneliti mencoba untuk memberikan solusi dalam mengambil kebijakan perbaikan jalan kabupaten dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja *Analytical Hierarchy Process* dan *Simple Additive Weighting* pada Penentuan Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten (Studi Kasus di Kabupaten Mesuji)**”. Pada penelitian ini prioritas penanganan jalan di Kabupaten Mesuji akan mempertimbangkan kriteria kondisi jalan, kriteria volume lalu lintas,

kriteria akses jalan dan kriteria kebijakan. Setiap kriteria akan diberikan bobot nilai dan dilakukan prosentase dari setiap kriteria yang ditetapkan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW). Dari hasil perbandingan kedua metode tersebut diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan metode mana yang lebih representatif yang dapat digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Mesuji di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana penerapan perbandingan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), dan *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan urutan prioritas penanganan jalan Kabupaten di Kabupaten Mesuji”.

1.3. Batasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data yang digunakan adalah data ruas jalan kabupaten Tahun 2016 di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan Kecamatan Simpang Pematang merupakan Kawasan Permukiman Perkotaan terbesar di Kabupaten Mesuji.
- b) Analisis Penentuan urutan prioritas penanganan jalan kabupaten dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a) Memperoleh perbandingan kinerja metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan urutan prioritas penanganan jalan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- b) Menganalisis urutan alternatif prioritas penanganan jalan di Kecamatan Simpang Pematang menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dan metode *Simple Additive Weighting* (SAW);
- c) Menghasilkan sistem informasi penentuan urutan prioritas penanganan jalan kabupaten di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a) Dari sudut Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas penanganan jalan kabupaten.
- b) Dari sudut masyarakat dapat memberi gambaran yang jelas tentang penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Mesuji dan diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.5 Sitematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi ke dalam beberapa bab untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terstruktur. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi obyek penelitian, analisis obyek penelitian, serta tahapan dan metode penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan mengenai urutan prioritas penanganan jalan kabupaten.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.